

KNPI KOTA PADANG DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL ERA ORDE BARU MENUJU REFORMASI

Desri Nora. AN

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Email : desrinora@ymail.com

Abstract

This article reveals the condition of KNPI as an organization that accommodate all youth organizations in facing social change that occurred in Indonesia from the New Order Regime towards Reformation Order. The results of this study shows that during the New Order Regime, KNPI became an extension of the ruling party and this condition is still affecting KNPI in the reformation era although Indonesia has undergone a social change.

Keywords: *KNPI, social change, reformation.*

Abstrak

Artikel ini mengungkapkan kondisi KNPI sebagai organisasi yang mengakomodir seluruh organisasi kepemudaan dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi di Indonesia dari Orde Baru kepada Reformasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama dalam masa Orde Baru, KNPI telah menjadi perpanjangan tangan dari partai penguasa dan kondisi ini tetap mempengaruhi KNPI di era reformasi meskipun Indonesia telah mengalami sebuah perubahan sosial.

Kata kunci: *KNPI, perubahan sosial, reformasi.*

Pendahuluan

Fenomena perjalanan, organisasi kepemudaan yang tergabung dalam wadah KNPI termasuk organisasi yang berperan penting pada era orde baru. Hal ini terlihat pada eksistensi para tokoh pengurus yang mempunyai posisi strategis di KNPI yang berpeluang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga menduduki posisi-posisi strategis lainnya di pemerintahan.

Namun demikian, masa orde baru KNPI dianggap sebagai perpanjangan tangan Partai Golongan Karya (GOLKAR), pengurus KNPI dipegang oleh kader-kader Golkar. Setiap kebijakan yang dibuat oleh KNPI selalu diintervensi oleh GOLKAR, sehingga KNPI sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan, dalam gerakannya kehilangan independensi dan tidak punya idealisme dalam memperjuangkan misi-misi kepemudaan. Secara lahir, kelihatannya KNPI terkesan sejahtera dan bahkan tergolong elit di kalangan organisasi kepemudaan, namun yang sebenarnya adalah boneka dari sebuah kendaraan partai politik yaitu Golkar.

Seiring waktu, perubahan dinamika arah perpolitikan pun terjadi dengan runtuhnya rezim orde baru dan lahirnya era reformasi. Kondisi tersebut, tentu memiliki pengaruh terhadap eksistensi KNPI, organisasi kepemudaan yang terkenal dan menjadi anak emas partai Golkar itu pun mulai kehilangan arah dan tidak lagi menjadi sebuah kebanggaan bangsa.

Bahkan dalam perjalanannya, sedikit terlupakan oleh banyak orang yang tidak lagi mengenal apa itu KNPI. Ironisnya lagi muncul wacana dari sebagian pemuda untuk membubarkan organisasi ini, wacana tersebut mencuat pada kongres KNPI di Bogor yang diadakan di Hotel Caringin tahun 2006.

Gejolak yang terjadi pada level pusat juga berpengaruh pada kondisi kepengurusan KNPI di tingkat provinsi, kota dan kabupaten. Tidak terkecuali dengan kepengurusan DPD KNPI Sumatera Barat, yang tidak lagi memiliki tempat bergantung dan menjadi organisasi kepemudaan terkuat seperti masa orde baru.

Fenomena organisasi KNPI di era reformasi inilah yang menarik untuk diteliti dengan melihat lebih dalam tentang sejauhmana

KNPI mem-*back up* pemerintahan orde baru serta tinjauan terhadap aktifitas dan struktur kepengurusan KNPI pada masa orde baru dan reformasi.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana KNPI sebagai organisasi pemuda mem-*back up* pemerintah Orde Baru?
2. Bagaimana aktifitas dan struktur organisasi KNPI era Orde Baru?
3. Bagaimana aktifitas dan struktur organisasi KNPI di era reformasi?

Tinjauan Pustaka

KNPI

KNPI merupakan singkatan untuk organisasi pemuda yang bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia. Sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda yang lahir pada Deklarasi Pemuda Indonesia tahun 1973. Kelahiran KNPI dimaksudkan sebagai wadah berhimpun pemuda Indonesia lintas etnis dan agama, lintas adat – istiadat dan segala jenis perbedaan alamiah (primordial) lainnya, yang pada hakikatnya merupakan unsur budaya Indonesia. Cakupan biasa keanggotannya nasional dan plural, dipersatukan oleh semangat dan cita-cita bersama sebagai kader bangsa yang memiliki tanggung jawab melanjutkan estafet kepemimpinan nasional demi masa depan bangsa Indonesia yang maju dan harmonis.

Secara fundamental, pembentukan KNPI merupakan salah satu perekat bangsa, yang mengedepankan visi dan misi bangsa (nasionalisme) yang menjangkau spektrum masyarakat (pemuda) Indonesia dan memiliki pandangan-pandangan ideal, dalam posisinya sebagai pewaris kepemimpinan masa depan bangsa. Dengan demikian, eksistensi KNPI adalah miniatur Indonesia sebagai keniscayaan dan kebutuhan yang dapat dirasakan manfaat dan pengaruhnya dalam konstelasi nasional.

Secara historis, KNPI merupakan kelanjutan dari sejarah perjuangan pemuda Indonesia sejak munculnya kebangkitan nasional yang dipelopori pemuda di masa kolonialisme. Kebangkitan nasional itu sendiri diawali dengan bergantinya corak perjuangan dari perlawanan lokal kepada terciptanya wadah lembaga-lembaga atau organisasi perjuangan yang dipelopori oleh pemuda.

Pada masa pergerakan nasional yang di-

mulai pada tahun 1908, para pemuda terpelajar dari Sekolah Kedokteran Hindia Belanda (STOVIA) di Batavia atau Jakarta membentuk sebuah lembaga kepemudaan yang bernama Boedi Oetomo, yang antara lain tokohnya adalah dr. Soetomo dan dr. Wahidin Soedirohusodo. Momentum ini merupakan awal lahirnya kesadaran berbangsa, yang memberikan pemahaman terhadap kebutuhan akan *self identity of the nation* yang merdeka dan berdaulat.

Pada tanggal 28 Oktober 1928, dalam kongres pemuda II para pemuda Indonesia yang telah terhimpun dalam berbagai lembaga kepemudaan, mempelopori Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah visi yang diciptakan oleh pemuda Indonesia dalam perjuangannya mewujudkan adanya sebuah bangsa Indonesia, yang ditegaskan dalam identitas-identitas kebangsaan bersama seluruh elemen yang ada.

Pascakemerdekaan, pemuda Indonesia kembali menjadi pelopor kebangkitan bangsa dengan berperan dalam berbagai proses perubahan bangsa. Dimulai dari munculnya angkatan 1966, dimana para pemuda dan mahasiswa mempelopori sebuah perubahan kehidupan berbangsa dari Orde Lama kepada Orde Baru. Begitupun, dengan angkatan 1998 yang telah mengantarkan kehidupan bangsa Indonesia dari Orde Baru ke era reformasi.

Dalam konteks ini, kehadiran KNPI tidak dapat dipisahkan dari konteks dinamika sejarah kepemudaan tanah air. Dalam semangat pembaharuan dan komitmen bersama pemuda Indonesia untuk mengisi pembangunan nasional secara nyata, KNPI hadir dengan ditandai oleh Deklarasi Pemuda pada 23 Juli 1973.

Sebagai wadah berhimpun berbagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Indonesia, pada hakikatnya KNPI adalah laboratorium kader bangsa atau kepemimpinan bangsa di masa depan. Sejak kelahirannya pada tahun 1973 hingga kini, telah mengalami berbagai priode kepemimpinan yang dimulai dari kepemimpinan David Napitupulu, Akbar Tanjung, Aulia Rachman, Abdullah Puteh, Didit Haryadi, Tjahjo Kumolo, Tubagus Haryono, Maulana Isman, Adhyaksa Dault, dan Idrus Marham.

Mencermati para tokoh pemimpin KNPI menjadi sebuah pengakuan bangsa bahwa KNPI benar-benar mampu menjadi wadah kaderisasi kepemimpinan dan telah menunjukkan keberhasilan serta prestasinya. Di sisi lain, KNPI

juga telah menjadi inspirasi bagi kehadiran pemuda Indonesia diberbagai bidang.

Perspektif Teori Fungsional-Struktural

Penerapan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsional-struktural. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. (Ritzer, 1992: 25)

Secara ekstrim, penganut teori ini beranggapan bahwa suatu peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi masyarakat. Dengan demikian pada tingkat tertentu umpamanya peperangan, ketidaksamaan sosial, perbedaan ras, bahkan kemiskinan “diperlukan” oleh suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan-lahan dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik, penganut teori ini memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikannya sehingga tetap dalam keseimbangan.

Talcot Parsons, sebagai salah satu tokoh aliran fungsional-struktural, mengemukakan tentang strategi analisa fungsional-struktural (dalam Johnson, 1990: 128) adalah bahwa struktural sosial dan tindakan manusia mencerminkan orientasi nilai dasar (yang mungkin berbeda untuk setiap masyarakat) dan keharusan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Keharusan ini menimbulkan persyaratan-persyaratan fungsional yang universal. Supaya masyarakat itu tetap hidup, tipe struktur tertentu harus dikembangkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan ini. Sekali orientasi nilai yang pasti dan pola struktural itu dilembagakan, akan ada berbagai persyaratan fungsional skunder, yang dapat mengakibatkan munculnya struktur-struktur manfaat. Karena itu, harus ada paling kurang suatu tingkat integrasi minimal antara berbagai struktur institusional dalam suatu masyarakat.

Jhonson (1990: 130-131) dan Veeger (1990: 207-208) menjelaskan bahwa selain struktur sosial, Parsons juga merumuskan empat persyaratan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem sosial yang dikenal dengan kerangka A-G-I-L. Keempat persyarat-

an itu adalah sebagai berikut:

- a. *Adaptation* (adaptasi), menunjuk pada keharusan bagi sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya yang meliputi sistem-sistem sosial lainnya, misalnya masyarakat lain dan lingkungan fisik.
- b. *Goal Attainment* (tujuan dan kemungkinan mencapainya), bahwa tindakan diarahkan pada tujuannya, terutama tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem.
- c. *Integrity* (integritas), bahwa ikatan emosional yang cukup dapat menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk bekerjasama yang dikembangkan dan dipertahankan sesuai dengan posisi dan peranannya masing-masing. Dalam prakteknya, integrasi diusahakan melalui Undang-undang, instruksi, kaidah dan lembaga yang berwenang.
- d. *Laten Pattern Maintenance* (mempertahankan identitasnya terhadap kegoncangan dan ketegangan yang timbul dari dalam), menunjuk pada berhentinya interaksi setelah suatu sistem nilai-nilai dilembagakan, tetapi selama periode ini komitmen para anggota pada sistem itu harus tetap utuh sehingga pada waktu yang tepat peran-peran sistem dapat diaktifkan kembali dan interaksi sistem diteruskan.

Menurut Lauer (1989: 109), keempat persyaratan fungsional diatas bersifat memaksa dan diterapkan pada semua sistem tindakan alamiah, kultur, kepribadian dan masyarakat. Dalam kenyataannya, keempat fungsi ini diterapkan pada tingkat tindakan umum. Adaptasi adalah fungsi perilaku organisme, pencapaian tujuan adalah fungsi kepribadian, integrasi adalah fungsi sistem sosial dan pemeliharaan pola adalah fungsi kultur.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertitik tolak kepada dua jenis sumber penting yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer pada umumnya terdiri dari dokumen-dokumen penting, laporan-laporan, notulen rapat, surat keputusan dan sejenisnya. Data-data tersebut diperoleh dari arsip KNPI dan perpustakaan Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Sedangkan, sumber data sekunder dikategorikan dalam sumber informasi secara lisan yang terlibat langsung dalam kepengurusan KNPI dari tingkat daerah

Sumbar, pengurus Organisasi kepemudaan (OKP) dan tokoh masyarakat dan pemerintah yang berkaitan dengan kinerja organisasi KNPI.

Untuk menjaga otentitas data, peneliti menggunakan standar keabsahan data:

Kepercayaan (*credibility*); Peneliti menjaga keterpercayaan penelitian dengan cara; Memelihara keakraban peneliti dengan aktor untuk memperoleh data yang di-harapkan; Ketekunan pengamatan, hal ini dilakukan karena informasi dari informan perlu di-tinjau secara silang untuk mendapatkan data yang solid; Melakukan triangulasi sehingga data dapat dipercaya (*dependability*). Peneliti berusaha konsisten dalam keseluruhan penelitian dengan meninjau ulang terhadap data yang diperoleh dengan memperhatikan prinsip konsistensi dan dapat diper-anggugjawabkan. Kepastian (*confirmability*)

Data dapat dipastikan kepercayaan dan diakui kualitas oleh banyak orang, apabila data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fokus dan latar alamiah penelitian yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan kualitas penelitian yang tergantung pada kualitas proses yang benar.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Dalam hal ini, peneliti meneliti dan menganalisis data dokumen mengenai sejarah KNPI, arsip Musyawarah Daerah (Musda) KNPI era Orde Baru dan reformasi, arsip pidato Musda era Orde Baru dan reformasi. Bahan yang digunakan adalah arsip sekretariat KNPI dan publikasi media massa. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum tentang KNPI dalam perubahan sosial.

b. Observasi

Melakukan pengamatan terhadap objek penelitian yaitu KNPI, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan partisipasi penuh peneliti terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pengurus maupun anggota KNPI.

c. Wawancara

Melakukan wawancara yang tidak terstruktur dengan orang-orang yang dianggap potensial, yang memiliki informasi tentang KNPI di masa Orde Baru dan reformasi, bisa jadi pengurus KNPI, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat maupun orang biasa.

Dalam proses analisis data, peneliti mengikuti tahapan peneliti yang dikemukakan

Spradley (1980: 96) yaitu:

a. Analisis Kawasan

Dilakukan untuk memeriksa catatan di lapangan guna menentukan kelompok berdasarkan instrumen atributnya

b. Analisis Taksonomi

Dilakukan untuk mencari hubungan antara komponen yang dihasilkan dan dikelompokkan dalam suatu kawasan tertentu.

c. Analisis Kompensional

Dilakukan untuk menentukan komponen-komponen yang mengandung arti secara sistematis yang berhubungan dengan kategori sosial.

d. Analisis Tema

Dilakukan untuk menemukan perilaku yang muncul dari tahapan-tahapan analisis sebelumnya.

Pembahasan

***Peran KNPI sebagai Organisasi Pemuda
Memback-Up Pemerintahan Orde Baru***

Dalam hal ini, sesungguhnya peneliti berusaha menyajikan secara komprehensif tentang gambaran organisasi ini sebagai satu-satunya organisasi pemuda yang memiliki legitimasi berada di bawah bayang-bayang Orde Baru. Disamping itu, bagaimana organisasi ini setahap demi setahap disurati dengan muatan-muatan politik dari partai politik tertentu, sehingga akan mampu menjawab pertanyaan sejauh manakah sesungguhnya organisasi KNPI ini dipergunakan selama pemerintah Orde Baru.

Melalui analisa terhadap pokok-pokok pikiran terhadap pelaksanaan Musda KNPI ke IV tahun 1985 yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 3 September 1985 yang dilaksanakan di Talawi Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Dalam pokok-pokok pikiran tersebut diuraikan tanggapan positif mengenai lahirnya Undang-undang tentang Partai Politik dan Golkar yang dipandang sebagai sebuah "prestasi" besar bangsa Indonesia selama empat dasawarsa dan merupakan tonggak sejarah yang meletakkan kerangka dasar yang kokoh dalam pembangunan politik serta melengkapi mekanisme demokrasi Pancasila yang terus dikembangkan.

Kebahagiaan yang ditegaskan KNPI terhadap Undang-undang Partai Politik dan Golkar, terkesan memberikan identitas sesungguhnya dari organisasi KNPI dan dapat dikatakan bahwa antara KNPI dan Partai Golkar tidak dapat dipisahkan dan menjadi rangkaian pembahasan yang jelas.

KNPI Kota Padang dalam ...

Dalam Musda ke VII DPD KNPI Sumatera Barat pada tanggal 23 sampai 25 September 1994, terdapat fenomena yang juga menarik, yang menjadi perhatian peneliti adalah dalam pokok-pokok pikiran Musda ke VII DPD KNPI Sumatera Barat dinyatakan bahwa pembangunan pedesaan merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian maksimal dari generasi muda melalui sistem dan pola yang sudah ada, yaitu ABRI Masuk Desa (AMD), Manunggal Sakato dan SPPD yang didukung oleh Instruksi Presiden (Inpres). Lebih lanjut, di bidang peningkatan kewaspadaan nasional dikemukakan bahwa Dwifungsi ABRI sebagai kekuatan HAMKATA dan kekuatan SosPol dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional perlu terus dikembangkan dalam kerangka nilai-nilai perjuangan pemuda.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah diuraikan, memberikan gambaran bahwa KNPI lebih banyak berupaya tentang bagaimana membantu dan mempertahankan kekuasaan Orde Baru dan mulai meninggalkan jati dirinya sebagai generasi bangsa yang memelopori perubahan bangsa.

Fenomena KNPI dan Partai Golkar yang telah diuraikan, juga dipertegas dari hasil wawancara peneliti dengan seorang Tokoh Masyarakat (TM) pada tanggal 11 Juli 2006, dimana tokoh tersebut mengungkapkan bahwa:

“Jika KNPI ingin eksis di masyarakat pada era reformasi saat ini, maka KNPI harus melepaskan belenggu Partai Politik yang selama ini memanjakannya.”

Pendapat senada juga dikemukakan oleh salah seorang ketua OKP (KO) pada tanggal 10 Juli 2006, ia mengatakan bahwa:

“Walau bagaimanapun KNPI harus bisa menerima kenyataan tentang KNPI sekarang yang bukan lagi perpanjangan tangan dari Partai Golkar, untuk itu KNPI harus mulai berangsur-angsur melihatkan jati dirinya sebagai organisasi yang mengakomodir semua OKP.”

Begitupun pendapat yang dikemukakan oleh Alumni KNPI (AK) pada tanggal 9 Juli 2006, yang mengungkapkan bahwa:

“Sebuah fakta yang tak dapat ditolak, jika kita perhatikan KNPI dulu dan sekarang tidak lebih dari sebagai batu loncatan untuk mendapatkan posisi strategis bagi elit pemuda. Baik di legislatif maupun eksekutif.”

Bahkan untuk lebih memperkuat

anggapan hasil analisa peneliti, pernyataan serupa dijelaskan oleh salah seorang pengurus KNPI kota Padang untuk Komisi Perempuan (KP) pada tanggal 12 Juli 2006, beliau menyatakan bahwa:

“Di era reformasi, masalah politik, KNPI kota Padang sekarang sudah mulai berangsur kembali kepada khitahnya, bahkan kualitas demokrasi mulai kelihatan. Pendidikan berpolitik pun secara terbuka sudah hampir bisa diterapkan. Namun semua ini tidak bisa dilakukan secara drastis harus secara bertahap. Karena sistem politik kita pun saat ini sudah berbeda tidak lagi diktator.”

Lebih lanjut dijelaskan oleh salah seorang Ketua KNPI kota Padang pada tanggal 11 Juli 2006 yang menjelaskan bahwa

“Sebenarnya bukanlah organisasi partai politik, tetapi yang bergabung di KNPI hanya berasal dari *underbow* partai politik sehingga dalam gerakannya terjadi tarik menarik kepentingan.”

Dalam pemahaman yang lebih dalam, dapat disimpulkan bahwa KNPI di masa Orde Baru telah menjadi formula pribadi bagi kalangan kader Partai Politik tertentu untuk menunjukkan loyalitasnya terhadap partai dan pemerintah. Hal ini dilakukan demi mencapai tujuan individu untuk dapat duduk di posisi strategis baik legislatif maupun eksekutif. Untuk itu, para kader partai secara diam-diam mengarahkan KNPI untuk taat pada satu partai politik, tentunya partai penguasa.

Perbandingan Struktur Anggota KNPI era Orde Baru dengan era Reformasi

Dari temuan peneliti terungkap bahwa KNPI era reformasi mengalami perubahan. Perubahan tersebut, diantaranya adalah sistem rekrutmen pengurus KNPI. Dimana, di masa Orde Baru, setiap pengurus harus sudah mengikuti penataran P4 yang dibuktikan dengan adanya sertifikat sebagai bukti tanda lulus pelatihan. Sementara itu, pada masa reformasi, P4 dihapuskan dan hanya persyaratan nilai-nilai idealis kepemudaan. Banyak hal yang direvisi pada era reformasi.

Namun, meskipun ada perubahan pola kepengurusan Orde Baru kepada reformasi tetapi pengurus yang duduk pun tetap memiliki nuansa politik. Bahkan pengurus yang ada di era reformasi sekarang, terjadi pembengkakan. Hal ini disebabkan oleh OKP yang tergabung

dalam KNPI semakin bertambah. Sesuatu yang tak dapat dielakkan bagi KNPI era reformasi bahwa banyak bermunculannya OKP baru serta aktifnya kembali OKP yang hampir mati di masa Orde Baru.

Lebih lanjut, dalam perekrutan pengurus juga dipengaruhi oleh unsur politik, hanya saja di era reformasi perpolitikan itu terjadi secara lebih terbuka dan tidak milik satu partai tertentu seperti Orde Baru.

Sebagai organisasi yang bertujuan mengakomodir seluruh potensi pemuda, tentunya KNPI diwarnai oleh berbagai macam ideologi dan OKP *underbow* pemilik. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi KNPI era reformasi, karena sisa-sisa Orde Baru yang memiliki pemikiran bahwa KNPI adalah kaki tangan sebuah partai ternyata tidak mudah untuk dihilangkan. Pengaruh itu masih memberikan warna walaupun intervensinya tidak terlalu banyak.

Permasalahan yang juga tengah dihadapi KNPI era reformasi adalah masalah keuangan merupakan persoalan yang tidak bisa diabaikan dalam sebuah organisasi. Tanpa adanya kemampuan keuangan, maka gerakan KNPI pun akan terhambat. Dengan demikian antara keuangan dengan KNPI tidak dapat dipisahkan dan harus saling melengkapi.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara pendanaan KNPI reformasi dengan Orde Baru. Pada masa KNPI Orde Baru, dana KNPI langsung di *back up* oleh pemerintah dalam APBN ataupun APBD. Namun, di era reformasi terjadi pergeseran, dana KNPI yang keluar sesuai dengan tingkat kreatifitas KNPI terhadap pemerintah.

Perbandingan Aktifitas KNPI Orde Baru dengan Reformasi

KNPI merupakan organisasi yang ber-

fungsi sebagai mediator, fasilitator dan katalisator bagi pemuda. Maka seyogyanya KNPI tidak sebagai pelaksana program. Namun, terkadang situasi ini juga tidak semuanya bisa dijalankan dan diperankan oleh KNPI. Satu hal perbedaan yang substansi antara KNPI dan OKP yaitu dalam program kerja. KNPI lebih kepada tataran kebijakan dan pengayoman bagi semua komponen bangsa. Sementara, OKP sudah masuk ke dalam tahap implementasi dari program.

Perbedaan antara KNPI Orde Baru dan reformasi diantaranya adalah pada masa Orde Baru program KNPI sudah tersusun dan diatur oleh pemerintah, sedangkan di era reformasi program KNPI tergantung kreatifitas dan kualitas yang ada pada personal dan pengurus KNPI.

KNPI reformasi dalam membuat program tidak ada intervensi pemerintah tetapi KNPI hanya melakukan sinergitas dengan pemerintah dengan tidak menjual nilai-nilai ideologi KNPI kepada pemerintah. Dengan demikian program yang dirancang KNPI reformasi tentulah dapat memposisikan KNPI sebagai organisasi sub-sistem yang akan saling memberikan kontribusi kepada pemerintah.

Lebih lanjut, permasalahan yang muncul dalam melaksanakan program-programnya, KNPI reformasi sangatlah dipengaruhi oleh wilayah politik praktis, yang terkait dengan siapa yang melaksanakan program, apa bentuk program dan kemana orientasi program tersebut. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Miriam Budiharjo (1981: 33) tentang perilaku politik terhadap faktor kepentingan bahwa pada dasarnya setiap manusia menginginkan adanya nilai-nilai yang meliputi kekuasaan, pendidikan, penerangan, kekayaan, kasih sayang, kejujuran, keadilan dan kesenangan.

Tabel 1. Perbandingan KNPI Era Orde Baru dan Reformasi

No	Aspek	Orde Baru	Reformasi
1	Tujuan	Pemersatu Bangsa (intervensi)	Pemersatu Bangsa (Independen)
2	Rekrutmen Pengurus	Tiripan Penguasa	Demokratis & terbuka
3	Sifat Organisasi	Formal	Formal
4	Komitmen Politik	Jadi Penguasa	Perjuangan nilai-nilai
5	Keuangan	APBN/APBD	Kreatifitas KNPI
6	Program	Back Up Pemerintah	Kepentingan Rakyat
7	OKP	Terbatas	Banyak Sekali
8	Implementasi Kegiatan	Terbatas	Demokrasi
9	Partai Politik	Partai Tunggal	Multi Partai
10	Intervensi Pengurus	Penataran P4	Ketokohan Pemuda

Simpulan

Tiga puluh dua tahun, bukan merupakan waktu yang singkat bagi kekuasaan Orde Baru dalam “memanjakan” pemuda Indonesia. Iming-imingan jabatan dan janji kekuasaan yang selalu dihadapkan kepada pemuda telah menjadikan pemuda Indonesia yang tergabung dalam organisasi KNPI kehilangan ruh perjuangan dan membangun bangsa. Hal ini terbukti, meskipun era reformasi telah merubah sistem pemerintahan namun tak dapat menghalangi KNPI untuk tetap dijadikan perpanjangan tangan bagi salah satu partai politik.

Daftar Rujukan

Asrid Susanto. 1985. **Pengantar Sosiologi dan**

Pengantar Sosial. Bandung: Bina Cipta

Berry David. 1995. **Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi.** PT. Raja Grafindo

Garna K. Judistira. 1992. **Teori-teori Perubahan Sosial.** Bandung: PPs Universitas Padjajaran.

Miriam Budiarjo. 1985. **Dasar-dasar Ilmu Politik.** Jakarta: Gramedia

Spradley James P. 1980. **Metode Etnograf.** PT. Tiara Wacana

Wila Huky. 1986. **Pengantar Sosiologi.** Surabaya: Usaha Nasional

Wiliam David. 1989. **Pendidikan Naturalistik.** Padang: PPs IKIP Padang.